

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020 dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan. LAKIP merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Pontianak dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020-2024.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini juga sebagai alat umpan balik untuk melakukan perbaikan dan perencanaan terutama sebagai input bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Dengan laporan ini juga diharapkan dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan evaluasi yang obyektif terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kota Pontianak oleh pihak lain yang berhak dan berkepentingan dalam menilai kinerja dan pertanggungjawaban, serta dapat memenuhi harapan masyarakat yaitu dalam merwujudkan "*clean government dan good governance*".

Pontianak, Januari 2022

Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak,

Dra. Hj. UTIN SRI LENA CANDRAMIDI, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19680410 199503 2 006

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Perhubungan sebagai unsur teknis pelaksanaan otonomi daerah di Kota Pontianak yang melaksanakan kewenangan di bidang Perhubungan serta tugas desentralisasi Pemerintah Kota Pontianak.

Sebagai sebuah Unit Kerja tentunya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perlu adanya penilaian dan evaluasi. Secara umum dalam tahun 2021 Dinas Perhubungan Kota Pontianak telah mencapai target kinerja. Indikator Kinerja Utama Kota yang dijadikan IKU Dinas yaitu rata-rata waktu tempuh dengan capaian kinerja dalam kategori **Sangat Berhasil** merupakan sasaran RPJMD atau Tujuan Renstra. Dan Indikator Kinerja Utama Dinas dari sasaran strategis terdiri dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu Indikator Kinerja Tingkat Kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak dengan kategori **Berhasil** dan Indikator Kinerja Tingkat Kinerja Pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan dengan kategori **Sangat Berhasil**. Berikut capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2021.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1. Meningkatnya Kualitas Transportasi	1. Rata-Rata Waktu Tempuh	Jam	0,05	0,044	112	Sangat Berhasil
2. Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2. Tingkat kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak	Kategori	B	B	B	Berhasil
3. Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan	3. Tingkat kinerja pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	%	80	80	100	Sangat Berhasil

Untuk mencapai target kinerja tersebut telah dilakukan berbagai upaya berupa penguatan reformasi birokrasi internal, peningkatan kualitas dan kapasitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, serta upaya koordinasi dan

peningkatan kerjasama dengan instansi terkait.

Capaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2021 juga didukung oleh anggaran dengan alokasi Rp. 42.691.172.205 dengan realisasi sebesar Rp. 40.610.597.238 atau dengan capaian 95,13%.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	
RINGKASAN EKSEKUTIF	
DAFTAR ISI	
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
C. Faktor - Faktor Kunci Keberhasilan	7
D. Maksud dan Tujuan	10
E. Sistematika Penyajian	11
 BAB II : PERENCANAAN KINERJA	 13
A. Perencanaan Strategis	13
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	16
 BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	 18
A. Capaian Kinerja Organisasi	18
B. Realisasi Anggaran	43
 BAB IV : PENUTUP	 46
 LAMPIRAN - LAMPIRAN :	
LAMPIRAN 1 : RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024	
LAMPIRAN 2 : RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021	
LAMPIRAN 3 : PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	
LAMPIRAN 4 : RENCANA AKSI TAHUN 2021	
LAMPIRAN 5 : LAMPIRAN-LAMPIRAN LAINNYA	

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Perhubungan sebagai unsur teknis pelaksanaan otonomi daerah di Kota Pontianak yang melaksanakan kewenangan di bidang Perhubungan serta tugas desentralisasi Pemerintah Kota Pontianak, yang sebelumnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Dinas Daerah Kota Pontianak sebagai unsur pelaksanaan otonomi daerah tepatnya pada Pasal 13 ditetapkan Pembentukan Dinas Perhubungan Kota Pontianak yang kemudian ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2005.

Dalam penilaian dan evaluasi yang dilakukan dengan pengukuran keberhasilan maupun kegagalan masih sulit dilakukan secara objektif. Kesulitan ini diantaranya disebabkan masih lemahnya data yang ada dan pengukuran kinerja selama ini lebih ditekankan pada kemampuan dalam menyerap dana/anggaran.

Oleh karena itu perlu disusun suatu sistem pengukuran kinerja yang dapat memberikan informasi atas efektifitas dari aktifitas pencapaian Kinerja Dinas. Untuk mengukur kinerja ini maka seluruh aktifitas harus dapat diukur dari sisi input (masukan) dengan penekanan pada proses, keluaran, manfaat dan dampak dari program yang dibuat. Melalui pengukuran kinerja ini keberhasilan akan dapat dilihat dari kemampuan mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan dan sasaran dari kegiatan yang tertuang dalam rencana strategis tahun ke-1 (satu) sampai dengan tahun ke-5 (lima).

Dinas Perhubungan Kota Pontianak memiliki peran yang strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kota Pontianak:

- a. Meningkatkan pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan darat (lalu lintas) dan air;
- b. Meningkatkan dan menata parkir perkotaan;

- c. Menerangi tiap ruas jalan yang menjadi kewenangan Kota Pontianak;
- d. Meningkatkan sistem pengangkutan sungai untuk menunjang sistem transportasi darat.

Adapun permasalahan utama atau isu strategis yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Pontianak secara umum yang terkait dengan Bidang Perhubungan, sebagai berikut :

- a. Penyediaan bahan kebijakan teknis berupa dokumen perencanaan umum bidang transportasi dan pemutakhiran data-data lalu lintas belum diwujudkan dengan optimal, antara lain penyusunan masterplan transportasi (Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan - RIJLLAJ dan Tatanan Rencana Transportasi Lokal - TATRALOK).
- b. Pertambahan jumlah kendaraan yang tidak sebanding dengan penambahan ruas jalan dan ruang parkir sehingga mengakibatkan kemacetan di beberapa ruas jalan.
- c. Jumlah angkutan umum di Kota Pontianak semakin berkurang, hal tersebut disebabkan berkurangnya peminat/pengguna angkutan umum dan lebih banyak masyarakat menggunakan kendaraan pribadi.
- d. Pemanfaatan Terminal dan Halte di Kota Pontianak oleh masyarakat sangatlah kurang sehingga jumlah Halte dan Terminal justru semakin berkurang.
- e. Lemahnya Database berkaitan dengan Kebutuhan dan data yang ada mengenai kondisi fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu, marka dan *guardrill*, serta fasilitas lainnya seperti *traffic light*, *warning light*, *zebra cross* dan CCTV.
- f. Kondisi sebagian besar peralatan pengujian kendaraan bermotor merupakan peralatan tua serta kondisi bangunan gedung pengujian kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan kondisi dan jenis kendaraan saat ini (kendaraan besar dan berbadan tinggi) sehingga pengujian harus dilakukan secara manual yang tentunya berpengaruh pada keakuratan pengujian.

- g. Masih kurangnya personil dan tenaga/SDM yang mempunyai keahlian khusus (kompetensi) bidang terminal, pengujian kendaraan bermotor, Penyidik (PPNS) Bidang Perhubungan, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (MRL), evaluasi andalalin dan pengelolaan perparkiran.
- h. Kurang optimalnya pengawasan dan sosialisasi/pembinaan kepada masyarakat berkenaan dengan standar keselamatan, peraturan lalu lintas, terminal dan perparkiran.
- i. Masih lemahnya pemanfaatan dan penataan angkutan sungai sampan bermotor sebagai salah satu angkutan umum sungai dalam wilayah Kota Pontianak.
- j. Masih kurangnya penataan dan pemanfaatan dermaga sampan bermotor sebagai salah satu prasarana/fasilitas transportasi sungai bagi masyarakat, yang memberikan kemudahan, kenyamanan, keamanan dan kelancaran dalam menuju lokasi yang diinginkan.
- k. Kurang layaknya pelabuhan penyeberangan yang ada sehingga perlu dilakukan penataan dan pengembangan sehingga dapat memberikan kemudahan, kenyamanan, keamanan dan kelancaran bagi masyarakat yang menggunakan angkutan penyeberangan.

B. TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 97 Tahun 2020, tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pontianak, bahwa Kepala Dinas Perhubungan mempunyai Tugas Pokok memimpin dan mengkoordinasikan program kerja Dinas Perhubungan yaitu merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada di bawahnya agar tugas berjalan efisien dan efektif.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut di atas, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan;
- b. Perumusan program dan rencana kerja dibidang perhubungan;
- c. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang perhubungan;
- d. Pengendalian dan pembinaan teknis dibidang perhubungan;
- e. Penyelenggaraan fasilitasi perizinan dibidang perhubungan;
- f. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perhubungan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain dibidang perhubungan yang diberikan oleh Walikota.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, dan Kepala UPT serta masing-masing Kasubbag dan Kasi.

2. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 97 Tahun 2020, dengan kriteria/tipe Dinas Perhubungan Kota Pontianak yaitu Tipe B, maka Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pontianak terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris Dinas

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur
2. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

c. Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan

1. Kepala Seksi Pengelolaan Perparkiran
2. Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

d. Kepala Bidang Perlengkapan Jalan

1. Kepala Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
2. Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum

e. Kepala Bidang Angkutan Sungai dan Penyeberangan

1. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Angkutan Sungai dan Penyeberangan

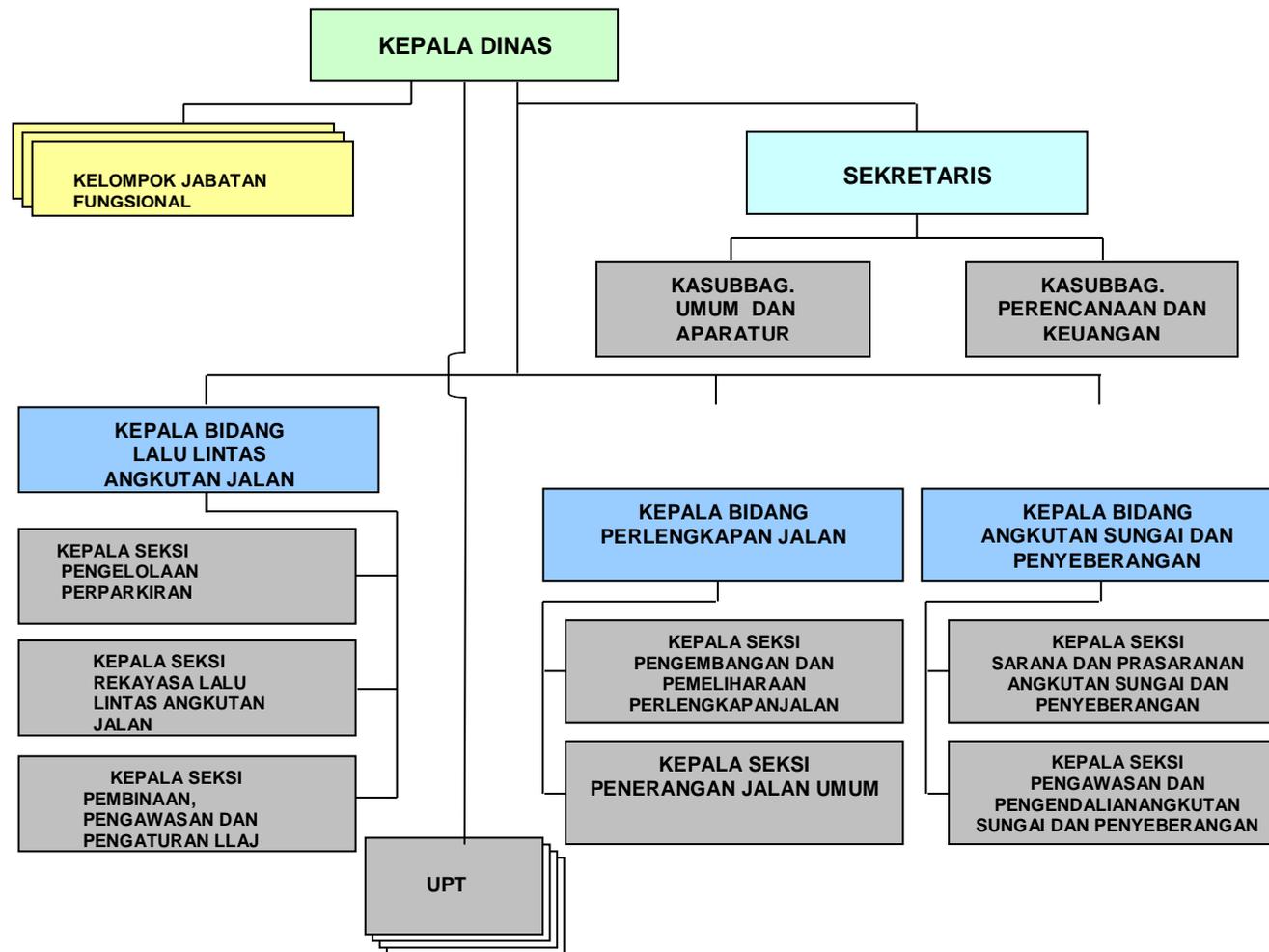
2. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Sungai dan Penyeberangan

f. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)

g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

Secara jelas dapat dilihat pada struktur berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK
(Berdasarkan PERWA Nomor 97 Tahun 2020)**



C. FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

1. Sumber Daya Manusia

Dalam menyelenggarakan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dibutuhkan sumber daya yang memadai agar kegiatan dapat terlaksana dengan cepat, tepat, transparan dan akuntabel, sehingga berdampak pada kinerja suatu instansi pemerintah.

Sumber daya yang dimaksud adalah Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Non Apartur Sipil Negara (Non ASN) yang memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kedudukan jabatan masing-masing mulai dari Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, hingga Staf.

Pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak didukung oleh 126 orang personil, yang terdiri dari 69 orang ASN dan 57 orang Non ASN. Komposisi personil Dinas Perhubungan Kota Pontianak pada tahun 2021 ini sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Formasi Kepangkatan Pegawai Dinas Perhubungan Kota Pontianak

NO	GOL/ RUANG	JUMLAH PNS (ORANG)		
		LK	PR	LK + PR
1	2	3	4	5
2	IV/c	-	1	1
3	IV/b	1	-	1
4	IV/a	5	-	5
5	III/d	6	1	7
6	III/c	8	2	10
7	III/b	6	5	11
8	III/a	6	1	7
9	II/d	12	2	14
10	II/c	9	-	9
11	II/b	3	-	3
12	II/a	1	-	1
JUMLAH		57	12	69

Tabel 1.2
Formasi Kepangkatan Pegawai
Dinas Perhubungan Kota Pontianak

NO	GOL / RUANG	JUMLAH PNS (ORANG)		
		LK	PR	LK + PR
1	2	3	4	5
1	IV	6	1	7
2	III	26	9	35
3	II	25	2	27
4	I	-	-	-
JUMLAH		57	12	69

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kota Pontianak

NO	JENIS PEGAWAI	JUMLAH PEGAWAI (ORANG)		
		LK	PR	LK + PR
1	2	3	4	5
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	57	12	69
2	Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	-	-	-
3	Pegawai Tidak Tetap (PTT)	51	6	57
JUMLAH		107	19	126

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kota Pontianak
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI (ORANG)		
		LK	PR	LK + PR
1	2	3	4	5
1	Magister (S-2)	4	2	6
2	Sarjana (S-1)	17	8	25
3	Diploma IV (D-4)	-	-	-
4	Sarjana Muda (D-3)	4	2	6
5	Sarjana Muda (D-2)	2	-	2
6	SMA / Sederajat	28	2	30
7	SMP / Sederajat	-	-	-
8	SD	-	-	-
JUMLAH		55	14	69

Dari komposisi personil berdasarkan pendidikan memang dirasakan masih perlu peningkatan kemampuan personil baik melalui pengembangan SDM lewat diklat/pelatihan khusus bidang Perhubungan maupun pengembangan tingkat pendidikan (D-III, D-IV, S-1, S-2) yang sesuai dengan formasi yang dibutuhkan, sehingga kemampuan dan wawasan personil meningkat sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu juga perlu adanya penambahan personil baru yang sesuai dengan keahlian dan formasi yang dibutuhkan oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak.

2. Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas sangat dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai agar proses pencapaian tujuan yang diharapkan dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak masalah sarana dan prasarana memang masih dirasakan kurang memadai, namun dengan keterbatasan yang ada tentunya kita berupaya semaksimal mungkin melaksanakan tugas yang diamanahkan dan tentunya kedepan terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana yang ada sehingga efektifitas dan efisiensi dapat terus tercipta.

Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sarana dan prasarana Dinas Perhubungan Kota Pontianak diantaranya Peningkatan Fasilitas dan Perbaikan Gedung/Kantor serta peralatan yang rusak, Penggantian dan Pengadaan peralatan kantor, Penambahan/Pengadaan serta pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional lapangan baik roda dua, empat, dan roda enam guna mendukung pengawasan dan patroli, pemeliharaan PJU serta peningkatan sarana dan prasarana UPT berupa sarana mobilitas, sarana efisiensi kerja dan prasarana kantor serta peralatan pengujian kendaraan bermotor yang akan dilakukan secara bertahap.

3. Sumber Dana

Sumber Dana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Pontianak berupa Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2021 dengan total anggaran sebesar Rp. 42.097.642.528 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.5
Anggaran Belanja Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2021

No	Jenis Belanja	Tidak Langsung	Langsung	Total
1	Belanja Pegawai	10.542.998.910		10.542.998.910
2	Belanja Barang dan Jasa		31.226.761.180	31.226.761.180
3	Belanja Modal		921.412.115	921.412.115
	Jumlah	10.542.998.910	32.148.173.295	42.691.172.205

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) mempunyai dua fungsi utama. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi instansi di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders*. Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja instansi di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang.

Maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Dinas Perhubungan Kota Potianak Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2021 sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2021. Esensi capaian kinerja yang berhasil dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai sampai dengan tahun 2021.
- Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP Tahun 2021 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Dinas Perhubungan Kota Pontianak dapat

merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2021 disajikan berpedoman pada PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah khususnya Lampiran II. Sejalan dengan hal tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

SAMPUL

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi
 - Tugas Pokok dan Fungsi
 - Struktur Organisasi
- C. Faktor – Faktor Kunci Keberhasilan
 - Sumber Daya Manusia
 - Kondisi Sarana dan Prasarana
 - Sumber Dana
- D. Maksud Dan Tujuan
- E. Sistematika Penyajian

BABII PERENCANAAN KINERJA

- A. Perencanaan Strategis
- B. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

BABIV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan pada masa depan tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dengan menyusun suatu perencanaan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dengan pendekatan perencanaan strategi yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya secara berkesinambungan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dalam hal ini periode Tahun 2020-2024 sesuai dengan periode RPJMD Kepala Daerah. Proses inilah yang akan menghasilkan Rencana Strategi (Renstra) instansi pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Rencana Strategis yang diuraikan pada bab ini adalah Rencana Strategis tahun 2020-2024, yang terdiri 7 (tujuh) komponen yaitu : Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran, Kebijakan dan Program serta Penanggungjawab Program.

1. *Pernyataan Visi*

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan tentang kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Perhubungan Kota Pontianak secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (*outcomes*).

Adapun perumusan Visi Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

TRANSPORTASI KOTA PONTIANAK YANG CERDAS, TERTIB, AMAN, LANCAR DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

2. *Pernyataan Misi*

Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan instansi pemerintah, sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Dinas Perhubungan Kota Pontianak memiliki misi:

1. Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur yang Cerdas, dan Berbudaya (Mengacu Pada Misi Ke-1 Kota)
2. Meningkatkan Pelayanan Administrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan (Mengacu Pada Misi Ke-3 Kota)
3. Meningkatkan Kualitas Penataan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Sungai (Mengacu Pada Misi Ke-2 Kota)
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Keselamatan Transportasi Jalan dan Sungai (Mengacu Pada Misi Ke-2 Kota).

Dari ke4 (dua) Misi yang ditetapkan di atas, secara jelas dapat dilihat dari uraian berikut ini :

MISI ke1 : *“Meningkatkan Pelayanan Administrasi, Akuntabilitas Kinerja Dan Keuangan Serta Profesionalisme Sumber Daya Aparatur”.*

Misi ini ditetapkan dalam upaya untuk mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif, menciptakan Profesionalisme birokrasi serta Sumber Daya Aparatur yang profesional, handal, dan memiliki wawasan pengetahuan, keterampilan, moral dan disiplin dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

MISI ke2 : *“Meningkatkan Pelayanan dan Penataan Sarana dan Prasarana Perhubungan untuk menciptakan Keamanan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas Darat dan Sungai”.*

Misi ini ditetapkan dalam upaya untuk menjadikan Transportasi di Kota Pontianak lebih disiplin, tertib, aman dan lancar melalui peningkatan pelayanan, pengendalian dan pengawasan melalui penataan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana perhubungan darat dan sungai yang memadai sesuai kebutuhan.

3. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi/penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai dan menghasilkan apa, dalam kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020 - 2024 adalah Meningkatkan Kualitas Transportasi di Kota Pontianak.

4. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak dalam

jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang. Sasaran di dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020 - 2024 adalah:

- 1) Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian kinerja merupakan sebuah kesepakatan kinerja antara kedua belah pihak terhadap tingkat capaian kinerja yang akan dicapai dan dikaitkan dengan tingkat pelaksanaan program/kegiatan, dalam hal ini antara Pimpinan SKPD dengan Walikota. Perjanjian kinerja ini menjabarkan rencana program/kegiatan dan targetnya dikomitmenkan oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak untuk dapat dicapai pada suatu tahun anggaran, yaitu tahun 2021.

Perjanjian dan rencana kinerja tahunan 2021 sebagaimana dituangkan dalam Lampiran Penetapan Kinerja tahun 2021, yang merupakan suatu perjanjian atau kontrak kinerja tahunan SKPD, yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja sasaran, target sasaran yang disusun berdasarkan indikator kinerja utama SKPD, program dan kegiatan beserta target keluaran (*output*) dan anggaran per program/kegiatan. Perjanjian kinerja ini akan menjembatani antara Rencana Strategis yang telah disusun dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja setiap tahun.

Perjanjian kinerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak tahun 2021 didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2021, yang merupakan dokumen yang memberikan kewenangan kepada Dinas Perhubungan Kota Pontianak untuk mengelolanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun Capaian Kinerja yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kota Pontianak pada Tahun Anggaran 2021 yang akan dinilai dan dituangkan ke dalam LAKIP, hanya Sasaran Strategis Pembangunan beserta indikator kinerja sasaran dan target yang ingin dicapai. Sedangkan sasaran rutin kesekretariatan tidak dibahas.

Tabel 2.1 berikut ini menampilkan Capaian kinerja dan target yang akan dicapai oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2021.

Tabel 2.1
Capaian Kinerja dan Target yang akan Dicapai
oleh Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1. Meningkatnya Kualitas Transportasi	1. Rata-Rata Waktu Tempuh	Jam	0,05
2. Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2. Tingkat kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak	Kategori	B
3. Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai dan Penyeberangan	3. Tingkat kinerja pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	%	80

Total anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan tercapainya 3 (tiga) sasaran strategis Dinas Perhubungan Kota Pontianak di luar sasaran strategis kesekretariatan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021 adalah sebesar Rp.29.657.315.933 sebagaimana Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Anggaran Sasaran Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1. <i>Meningkatnya Kualitas Transportasi</i>	1. Rata-Rata Waktu Tempuh		29.657.315.933
2. Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2. Tingkat kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	28.788.579.753
3. Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai dan Penyeberangan	3. Tingkat kinerja pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	Pengelolaan Pelayanan	868.736.180

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja merupakan bagian penting dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen yang bersifat sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis SKPD sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis SKPD. Pengukuran kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja SKPD tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan satuan target kinerja yang telah ditetapkan dari masing-masing indikator kinerja sasaran dengan realisasi target kinerja yang diperoleh/dicapai melalui pelaksanaan program/kegiatan serta penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen pelaksanaan anggaran.

Pengukuran kinerja, memuat tentang sasaran strategis, indikator kinerja sasaran (*outcome*), target kinerja (*output*), realisasi, persentase capaian target kinerja, program/kegiatan, dan persentase realisasi anggaran per program/kegiatan. Inti dari pengukuran kinerja adalah membandingkan antara capaian kinerja yang diukur dengan indikator kinerja atau ukuran kinerja sebagai alat ukurnya serta dengan menggunakan metode pengukuran yang telah ditetapkan.

1.1 Metode Perbandingan Rencana dan Realisasi.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- (a) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja

atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- (b) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau :

$$\text{Indikator Kinerja} = \frac{2 \times \text{Rencana} - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat diketahui dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

1.2 Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Hasil pengukuran capaian kinerja disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Interval	Kategori
> 85	= Sangat Berhasil
$70 < \bar{x} \leq 85$	= Berhasil
$55 < \bar{x} \leq 70$	= Cukup Berhasil
≤ 55	= Tidak Berhasil

2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta hambatan kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah pemecahan masalah yang diambil instansi dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran (*outcome*) dan indikator kinerja kegiatan (*output*) yang ingin dicapai dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2020. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai input bagi proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Evaluasi dan analisis capaian kinerja disajikan secara sistematis berdasarkan format pengukuran kinerja, yaitu dengan terlebih dahulu menyajikan hasil pengukuran terhadap capaian kinerja sasaran strategis beserta indikator kinerja sasaran, target dan realisasinya, dan dilanjutkan dengan hasil pengukuran kinerja kegiatan beserta indikator kinerja kegiatan, target dan realisasinya, dan realisasi anggarannya.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis, dilakukan analisis capaian kinerja, dengan :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja;
2. Membandingkan antara realisasi capaian kinerja sasaran tahun penilaian serta capaian kinerja sasaran beberapa tahun terakhir (sesuai Renstra berjalan);
3. Membandingkan realisasi kinerja dengan target jangka menengah pada tahun Renstra sesuai dokumen Renstra;
4. Membandingkan realisasi kinerja dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Sesuai Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja 2021, terbagi menjadi 1 (satu) sasaran RPJMD (tujuan renstra) yang merupakan IKU Kota, 2 (dua) sasaran strategis yaitu sasaran yang bersifat pelayanan administrasi (kesekretariatan) atau sasaran internal, dan sasaran yang bersifat pelayanan eksternal (strategis pembangunan) yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja sasaran yang harus dicapai. Adapun capaian kinerja sasaran yang diukur capaiannya pada LAKIP ini hanya terhadap 3 sasaran strategis pembangunan dan indikator kinerjanya yang dicapai pada pelaksanaan anggaran tahun 2021.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka Dinas Perhubungan Kota Pontianak telah menetapkan Capaian Kinerja sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas. IKU (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. IKU Kota yang dijadikan IKU Dinas adalah sasaran RPJMD atau Tujuan Renstra dengan indikator kinerja rata-rata waktu tempuh merupakan salah satu indikator capaian keberhasilan Walikota. Dan IKU Dinas Perhubungan Kota Pontianak dari sasaran strategis yaitu:

- a. Tingkat Kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak.
- b. Tingkat Kinerja Pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan.

Analisis Capaian Kinerja adalah sebagai berikut :

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi

Analisa terhadap Capaian Kinerja Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2020 (IKU Kota) dengan Sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya Kualitas Transportasi dengan indikator Rata-Rata Waktu Tempuh dan 2 Sasaran Strategis Dinas Perhubungan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1. Meningkatnya Kualitas Transportasi	1. Rata-Rata Waktu Tempuh	Jam	0,05	0,044	112	Sangat Berhasil
2. Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2. Tingkat kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak	Kategori	B	B	B	Berhasil
3. Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan	3. Tingkat kinerja Pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	%	80	80	100	Sangat Berhasil

1) Sasaran RPJMD (IKU Kota)

Dari tabel pada Sasaran RPJMD Pemerintah Kota Pontianak, untuk Indikator Kinerja Utama tercermin dengan pencapaian indikator berikut :

1. Rata-Rata Waktu Tempuh

Rata-rata waktu tempuh merupakan waktu rata-rata yang diperlukan untuk melakukan perjalanan dari satu titik ke titik lain di Kota Pontianak. Titik pantau yang dijadikan acuan adalah 12 ruas jalan utama yang di Kota Pontianak. Rata-rata waktu tempuh yang ingin dicapai sesuai dengan Renstra Dinas Perhubungan 2020-2024 adalah 0,05 jam, dengan asumsi kecepatan kendaraan adalah 40 km/jam.

Guna untuk meningkatkan faktor keselamatan dan keamanan lalu lintas kecepatan kendaraan di Kota Pontianak di turunkan menjadi 30 km/jam. Dengan demikian rata-rata waktu tempuh juga diturunkan menjadi 0,067 jam. Rata-rata waktu tempuh perjalanan di Kota Pontianak berdasarkan rencana dan hasil pengukuran pada tahun 2021 dapat digambarkan pada tabel berikut ini.

RATA-RATA WAKTU TEMPUH PERJALANAN DALAM KOTA

NO	NAMA JALAN	PANJANG (DALAM METER)	KECEPATAN dan WAKTU TEMPUH				Waktu Tempuh		
			40 km/jam		30 km/jam		2021		
			jam	menit	jam	menit	jam	menit	Kec. Rata2
1	Jl. Imam Bonjol	1.860 M	0.05	2.79	0.06	3.72	0.07	4.40	25
2	Jl. Adi Sucipto	1.500 M	0.04	2.25	0.05	3.00	0.06	3.33	27
3	Jl. Hasanudin	0.730 M	0.02	1.10	0.02	1.46	0.02	1.41	31
4	Jl. H. Ra. Rahman	2.110 M	0.05	3.17	0.07	4.22	0.08	5.07	25
5	Jl. Husein Hamzah	3.819 M	0.10	5.73	0.13	7.64	0.11	6.53	35
6	Jl. Kom. Yos Sudarso	5.680 M	0.14	8.52	0.19	11.36	0.20	12.13	28
7	Jl. Pak Kasih	0.690 M	0.02	1.04	0.02	1.38	0.02	1.21	34
8	Jl. Rahadi Usman	0.370 M	0.01	0.56	0.01	0.74	0.02	1.02	22
9	Jl. Pahlawan	0.350 M	0.01	0.53	0.01	0.70	0.01	0.55	38
10	Jl. Tanjungpura	2.110 M	0.05	3.17	0.07	4.22	0.07	4.19	30
11	Jl. Ahmad Yani	3.360 M	0.08	5.04	0.11	6.72	0.12	7.38	27
12	Jl. Veteran	0.690 M	0.02	1.04	0.02	1.38	0.02	1.14	36
		jumlah	0.58	34.90	0.78	46.54	0.81	48.36	360
		rata2	0.05	2.91	0.06	3.88	0.067	4.03	30

Untuk lebih jelas dapat dijabarkan sebagai berikut :

Sasaran Strategis dari Sasaran RPJMD (Tujuan Renstra) dengan Indikator Kinerja Utama Rata-Rata Waktu Tempuh yang merupakan IKU Kota dengan capaian kinerja tahun 2021 adalah 0,044 jam dalam kategori **Sangat Berhasil**.

Pengukuran rata-rata waktu tempuh perjalanan dalam Kota Pontianak pada 12 ruas jalan terpilih yang dapat dianggap mewakili kondisi lalu lintas di Kota Pontianak. Ruas jalan tersebut adalah Jl. Imam Bonjol, Jl. Adi Sucipto, Jl. Hasanudin, Jl. H.RA. Rahman, Jl. Husein Hamzah, Jl. Kom Yos Sudarso, Jl. Pak Kasih, Jl. Rahadi Usman, Jl. Pahlawan, Jl. Tanjungpura, Jl. Ahmad Yani dan Veteran. Ke-12 ruas jalan tersebut memiliki batas kecepatan maksimal yaitu 40 km/jam.

Berbeda dengan Tahun 2020 yang mengambil sampel hanya pada 1 (satu) ruas jalan yaitu Jl. Tanjungpura. Pada awalnya, ruas jalan Tanjungpura direncanakan

memiliki kecepatan 50-80 km/jam. Dengan kondisi masih dilaluinya kendaraan besar berpengaruh pada keselamatan lalu lintas maka kecepatan maksimal kendaraan pada ruas jalan Tanjungpura, di batasi sebesar 40 km/jam.

Pemilihan lokasi survei tahun 2021 dilakukan dengan menggunakan asumsi kecepatan maksimal kendaraan di dalam kota sebesar 40 km/jam.

Hasil survei pada 12 ruas jalan tersebut menunjukkan bahwa kecepatan rata-rata kendaraan mencapai 30 km/jam.

Untuk mengukur waktu tempuh pada ruas jalan terpilih menggunakan rumusan sebagai berikut :

$$\frac{\text{rata-rata jarak tempuh (s)}}{\text{rata-rata kecepatan (v)}} = (t) \text{ jam}$$

Untuk mendapatkan waktu tempuh rata-rata di Kota Pontianak digunakan 12 ruas jalan terpilih sebagai sampel. Waktu tempuh rata-rata adalah jumlah waktu tempuh total pada seluruh ruas jalan terpilih dibagi jumlah jalan yang dipilih atau dengan formulasi sebagai berikut :

$$\Sigma t = \frac{\Sigma \text{ waktu tempuh}}{(n) \text{ jalan}}$$

$$\Sigma t = \Sigma \text{ waktu tempuh}$$

$$t = t_1 + t_2 + t_3 + \dots + t_{12}$$

$$\Sigma t = \frac{\Sigma \text{ waktu (total waktu rata-rata)}}{12}$$

$$= \frac{0,81}{12}$$

$$= 0,067$$

$$\text{Indikator kinerja} = \frac{0,06 - (0,067 - 0,06)}{0,06} \times 100\%$$

$$= \frac{0,06 - (0,067 - 0,06)}{0,06} \times 100\%$$

$$= \frac{0,06 - (0,007)}{0,06} \times 100\%$$

$$= \frac{0,0053}{0,06}$$

$$= 88,34\%$$

Apabila hasil perhitungan ini dikonversikan dengan standar/target semula, maka waktu tempuh rata-rata pada tahun 2021 adalah :

$$0,05 \times 88,34\% = 0,044 \text{ jam}$$

Capaian Kinerja Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2021 pada indikator rata-rata waktu tempuh Tahun 2021 yaitu 0,044 jam (2 menit 38 detik). Capaian kinerja ini lebih cepat dibandingkan dengan target sebesar 0,05 jam (3 menit 11 detik). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Capaian Indikator Kinerja Utama Meningkatnya Kualitas Transportasi di Tahun 2021 dikategorikan **Sangat Berhasil**. Dengan Pencapaian Indikator Sasaran adalah 112%. Pada indikator ini realisasi dikatakan tercapai, karena realisasi lebih cepat dibandingkan target.

Tabel
Capaian Kinerja Sasaran Strategis (Sasaran RPJMD/Tujuan Renstra)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Meningkatnya Kualitas Transportasi	Rata-Rata Waktu Tempuh	Jam	0,05	0,044	112	Sangat Berhasil

Adapun Program yang mendukung adalah :

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Dengan Kegiatan sebagai berikut :

✓ Penyediaan Perlengkapan Jalan di Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

✓ Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan

Sub Kegiatan :

1. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan
2. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
3. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota

- ✓ Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

- ✓ Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Sub Kegiatan :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

- ✓ Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan
3. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

b. Program Pengelolaan Pelayaran

Dengan Kegiatan sebagai berikut :

- ✓ Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

Sub Kegiatan :

1. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau
2. Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau

2) Sasaran Strategis I : Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Sasaran ini diarahkan untuk mewujudkan tujuan Misi 4 Dinas Perhubungan Kota Pontianak yaitu, *“Meningkatkan Kualitas Pelayanan dan Keselamatan Transportasi Jalan dan Sungai”*.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut pada tahun 2021 dicapai melalui 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu:

2.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak

Untuk mengukur indikator kinerja Tingkat Kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak, maka dilaksanakan dengan 1 (satu) program, 5 (lima) kegiatan dan 13 sub kegiatan. Untuk itu capaian yang tercapai adalah sebagai berikut:

Tabel
Capaian Tingkat Kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak Tahun 2021
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

No	Tingkat Kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak	Target	Realisasi	%	Kategori
1	Jumlah Perlengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas yang disediakan dan dilakukan pemeliharaan	16 jenis	15 jenis	93,75	-
2	Jumlah Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	- kegiatan	- kegiatan	-	-
3	Jumlah Angkutan Orang yang Tersedia	10 bus	10 bus	100	Sangat Berhasil
4	Jumlah Lokasi penyelenggaraan dan pengawasan titik perparkiran	300 Titik	300 Titik	100	Sangat Berhasil
5	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Diuji	16.300 unit	11.680 unit	71,65	Berhasil
	Rata - Rata	100%		91,35	Sangat Berhasil
	% Capaian	80%		73,08	Sangat Berhasil

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator kinerja Tingkat Kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak dengan nilai capaian 73,08% dari target 80% atau dengan kategori Sangat Berhasil.

2.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak

Melalui 1 Program Tahun 2021, yaitu :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan indikator Persentase Perlengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas yang disediakan dan dilakukan pemeliharaan.

Terdiri dari Kegiatan dan Sub Kegiatan, yang penjelasan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1.) Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, dengan indikator Jumlah Perlengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas yang disediakan dan dilakukan pemeliharaan dengan target kinerja 16 jenis perlengkapan jalan dan terealisasi 15 jenis perlengkapan jalan.

Kegiatan ini terdiri dari beberapa sub kegiatan, yaitu :

- a.) *Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas yang disediakan*

Capaian kinerja output ini dicapai melalui pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota. Anggaran Sub Kegiatan ini sebesar Rp.1.079.840.029 dan terealisasi Rp.971.394.000.

Di dalam Sub kegiatan ini terdapat beberapa pekerjaan yaitu :

- Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light, pada APBD Perubahan kegiatan ini di drop sehingga tidak dapat dilaksanakan.
- Pengecatan Zona Selamat Sekolah, ini dilaksanakan pada 3 lokasi pada Tahun 2021 yaitu : 1. Sekolah Kanisius. 2. Sekolah Maranatha, 3. SD Fajar Harapan. *Outcome* dari kegiatan ini adalah untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas di kawasan sekolah dengan memberikan peringatan kepada pengendara kendaraan bermotor agar mengurangi kecepatan kendaraan. Jumlah dan lokasi ZoSS yang ada di Kota Pontianak hingga akhir 2020 berjumlah 21 lokasi. Pada tahun 2021 pembuatan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) dilakukan pada 3 lokasi, sehingga jumlah ZoSS yang ada menjadi 24 yang mana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

NO	NAMA LOKASI DAN JALAN	TAHUN PEMBUATAN
1.	Depan SMP Negeri 9Jl. Pangeran Nata Kesuma	2014
2.	Depan SD Negeri 34Jl. Prof. Muhammad Yamin	2014
3.	Depan SD Negeri 17Jl. Putri Candra Midi	2015
4.	Depan SD BawamaiJl. KH. Ahmad Dahlan	2015
5.	Depan SD Bina 45Jl. Tanjung Raya II	2015
6.	Depan SDN 3 dan MTS Al-IrsyadJl. Tanjung Raya II	2015
7.	Depan SMP Negeri 1Jl. Merdeka	2016
8.	Depan SMKN 1Jl. Danau Sentarum	2016
9.	Depan SD BawariJl. Merdeka	2016
10.	Depan SD Negeri 01Jl. Suprpto	2016
11.	Depan MIN Pal VJl. Husein Hamzah	2016
12.	SMP Negeri 13Jl. Tebu	2017
13.	SMP Negeri 5Jl. Hasanudin	2017
14.	SMK Negeri 2Jl. Khatulistiwa	2017
15.	SMP Negeri 10 Jl. WR. Supratman	2018
16.	SMP Negeri 16 Jl. Martadinata	2018
17.	SD Negeri 31 Jl. Tabrani Ahmad	2018
18.	SD Negeri 34 Kec. Pontianak Kota	2019
19.	SD Negeri 06 Kec. Pontianak Selatan Jl. S. Parman	2019
20.	SMPN 19 Jl. Ampera	2020
21.	SDN 35 Pontianak Selatan Jl. Nirbaya	2020
22.	Sekolah Kanisius	2021
23.	Sekolah Maranatha	2021
24.	SD Fajar Harapan	2021

- Pengecatan Marka Jalan, di lakukan pada 11 lokasi sesuai dengan target pelaksanaan, diantaranya lokasi pd Jl. Teuku Umar, Jl. KHA. Dahlan, Jl. KHW. Hasyim, Jl. Tanjungraya 2, Jl. Gajahmada, Jl. Uray Bawadi, Jl. Putri Candramidi, Jl. Suwignyo, Jl. Panglima Ain, Jl. HOS. Cokroaminoto (depan pasar) dan M. Sohor.
- Pengecatan Zebra Cross, dilaksanakan pada 9 lokasi/simpang, yaitu :
 - Simpang Digulis
 - Simpang Pattimura
 - Simpang Alaiyang
 - Simpang Uray Bawadi-St. Syahrir
 - Simpang Ampera
 - Simpang Pancasila-Podomoro
 - Simpang Suwignyo
 - Simpang Danau Sentarum

- Simpang Parit Besar (Diponegoro)

- Pengadaan CCTV
- Pengadaan dan Pemasangan Rambu, terealisasi sebanyak 70 rambu tahun 2021.
- Mobile CCTV Pengawas Lalu Lintas
- Meterisasi PJU Tersebar di Kota Pontianak
- Pembangunan PJU Tersebar di Kota Pontianak
- Rehabilitasi Fiber Optic, dilaksanakan pada Simpang Garuda-Simpang Untan, Simpang Untan-Simpang Paris 1, Simpang Paris 1-Simpang Soedarso, Simpang Sudarso-Simpang Polda, Simpang Abdurahman Saleh dan SPBU Imam Bonjol (dekan Untan).

b.) *Jumlah Prasarana Jalan yang Dibangun*

Capaian kinerja output ini dicapai melalui pelaksanaan Sub Kegiatan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota. Anggaran Sub Kegiatan ini sebesar Rp.21.897.729.745 dan terealisasi Rp.21.568.996.616. Kegiatan ini adalah kegiatan pembiayaan pembayaran rekening PJU di Kota Pontianak dan Pembangunan Halte. Pembangunan Halte dalam APBDP di drop sehingga tidak terlaksana.

c.) *Jumlah Prasarana Jalan yang Direhab atau Dipelihara*

Capaian kinerja output ini dicapai melalui pelaksanaan Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan. Anggaran Sub Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.1.992.613.270 dan terealisasi Rp.1.971.673.600. Pekerjaan komponen-komponen rambu-rambu mendominasi sub kegiatan ini diantaranya pada belanja Perlengkapan PJU (Swakelola) Tahap I, belanja Perlengkapan Penerangan Taman, belanja Pemeliharaan ATCS/CCTV, dan lain sebagainya.

- 2.) Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja Jumlah Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
- a.) *Jumlah Dokumen hasil rekayasa lalu lintas yang dibuat*
Capaian kinerja output ini dicapai melalui pelaksanaan Sub Kegiatan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota di drop sehingga tidak dilaksanakan.
- b.) *Jumlah lokasi yang dilakukan pengawasan dan rekayasa lalu lintas*
Capaian kinerja output ini dicapai melalui pelaksanaan Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp.952.996.000 dan terealisasi Rp.936.239.292,5 atau 98,24..
- c.) *Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Bidang LLAJ*
Capaian kinerja output ini dicapai melalui pelaksanaan Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp.98.100.000 dan terealisasi Rp.97.350.000 atau 99,23%.
- 3.) Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan indikator kinerja Jumlah Angkutan Orang yang Tersedia
- a.) *Persentase Tersedianya Bus BRT Dalam Kondisi Baik.*
Capaian kinerja output ini dicapai melalui pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp.764.351.900 dan realisasi Rp.551.436.204 atau 72,14%.

b.) *Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang*

Capaian kinerja output ini dicapai melalui pelaksanaan Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota. Sub kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.68.960.200 dan terealisasi Rp.68.777.798,5 atau 99,73%.

4.) *Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, dengan indikator kinerja Jumlah Lokasi penyelenggaraan dan pengawasan titik perparkiran*

a.) *Jumlah Lokasi penyelenggaraan dan pengawasan titik perparkiran*

Capaian kinerja output ini dicapai melalui pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin dengan anggaran Rp.1.430.318.101 dan terealisasi Rp.1.343.133.718 atau 93,90%.

5.) *Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan indikator kinerja Jumlah Kendaraan Bermotor yang Diuji*

a.) *Jumlah Alat Pengujian yang dilakukan pemeliharaan*

Capaian kinerja output ini dicapai melalui pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dengan anggaran sebesar Rp.425.636.927 dan terealisasi Rp.413.452.997 atau 97,13%. Sub Kegiatan ini mempunyai target 2 paket pekerjaan yang telah terealisasi yaitu pengecoran halaman parkir Pengujian Kendaraan Bermotor dan pemeliharaan peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor (Kalibrasi).



Service/Perawatan Air Genset



Service/Perawatan Break Tester



Service/Perawatan Axle Load Meter

Service/Perawatan Compressor



Service/Pemeliharaan Side Slip Tester



Service/Pemeliharaan Speedometer Tester



Service/Pemeliharaan Car Lift

Service/Pemeliharaan Car Lift

b.) *Jumlah Kegiatan Pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor*

Capaian kinerja output ini dicapai melalui pelaksanaan Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan dengan anggaran Rp.78.033.581 dan terealisasi Rp.75.674.800 atau 96,97%. Target kinerja 144 hari dan terealisasi 134 hari.

3) *Sasaran Strategis II : Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan*

Untuk mewujudkan sasaran tersebut pada tahun 2021 dicapai melalui 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu:

3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan

Melalui 1 Program Tahun 2021, yaitu :

1. Program Pengelolaan Pelayaran

Penjelasan dari masing-masing indikator kinerja sub kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Jumlah pengoperasian dan pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Dermaga

Capaian kinerja output ini dicapai melalui pelaksanaan Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau dengan anggaran sebesar Rp.561.494.100 dan terealisasi Rp.557.642.542,5 atau 99,31%. Sub Kegiatan ini dilaksanakan 365 hari dalam setahun dan mencapai target. Sehingga capaian kinerja tercapai 100% dan dikategori sangat berhasil.

2) Jumlah pengawasan pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan

Capaian kinerja output ini dicapai melalui pelaksanaan Sub Kegiatan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau dengan anggaran sebesar Rp.307.242.080 dan terealisasi Rp.306.784.000 atau 99,85%. dengan rencana target fisik pelaksanaan 144 hari/tahun dan terealisasi 144 hari.

Tabel

Capaian Tingkat Kinerja Pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan Tahun 2021
Program Pengelolaan Pelayaran

No	Tingkat Kinerja Pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	Target	Realisasi	%	Kategori
1	Jumlah Kegiatan Pembangunan, Pemeliharaan, dan Pengawasan pada Pelabuhan dan Angkutan Penyeberangan	2 kegiatan	2 kegiatan	100	Sangat Berhasil
	Rata - Rata	100%		100	Sangat Berhasil
	% Capaian	80%		80	Sangat Berhasil

Lokasi ATCS/CCTV di Kota Pontianak Tahun 2020

No	Lokasi	Jumlah Kamera	Kondisi	Tahun Pemasangan
1.	Bardan - Rahadi Usman (Tugu Adipura)	4	Baik	2015
2.	Jl. ST. Abdurahman - Jl. Johan Idrus (Simpang Jihad)	3	Baik	2015
3.	Jl. Ahmad Yani - Bundaran UNTAN	4	Baik	2016
4.	Jl. Ahmad Yani (Simpang Pajak)	4	Baik	2016
5.	Jl. Tanjung Raya I- Jl. Tanjung Raya II	4	Baik	2016
6.	Jl. Tanjungpura - Jl. Diponegoro (Parit Besar)	3	Baik	2016
7	Jl. Imam Bonjol - Jl. Pahlawan (Hotel Garuda)	4	Baik	2017
8	Jl. Pahlawan - Jl. Gajahmada (Flamboyan)	4	Baik	2017
9	Jl. Pattimura - Jl. Gajahmada	3	Baik	2016
10	Jl. Antasari - Jl. Diponegoro	3	Baik	2017
11	Jl. Asahan - Jl. Tanjungpura	3	Baik	2017
12	Jl. Perintis Kemerdekaan - Jl. Trans Kalimantan	4	Baik	2017
13	Jl. 28 Oktober - Jl. Perintis Kemerdekaan	4	Baik	2017
14	Simpang Johar	3	Baik	2018
15	Simpang Pancasila	3	Baik	2018
16	Simpang Suwignyo	3	Baik	2018
17	Pasar Sentral	3	Baik	2018
18	Simpang Matahari	3	Baik	2018
19	U Turn (Depan Ex, POM Bensin OSO)	4	Baik	2018
20	Dibawah JPO Depan Ayani Mega Mall	4	Baik	2018
21	Simpang Polda	2	Baik	2018
22	Simpang Gertak I	4	Baik	2019
23	Simpang Gertak III	4	Baik	2019
24	Simpang Jeranding	4	Baik	2019
25	Simpang Syakirin	4	Baik	2019
26	Ferry penyeberangan Bardan	2	Baik	2019
27	Simpang Uray Bawadi - St. Syahrir	2	Baik	2019
28	Depan Rumah Radakng	2	Baik	2019
Jumlah		84		

Rekapitulasi Jumlah Kendaraan yang Diuji pada Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2014-2021

TAHUN	TARGET	REALISASI	Capaian %
2014	16.312 Unit	10.401 Unit	63,76
2015	13.299 Unit	12.239 Unit	92,03
2016	15.851 Unit	14.715 Unit	92,83
2017	15.492 Unit	14.139 Unit	91,27
2018	15.870 Unit	12.441 Unit	78,39

2019	15.942 Unit	12.533 Unit	78,62
2020	16.000 Unit	11.236 Unit	70,23
2021	16.300 Unit	11.680 Unit	71,65

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Beberapa Tahun Terakhir

Terkait dengan indikator kinerja IKU Kota rata-rata waktu tempuh analisa perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan beberapa tahun terakhir yaitu Tahun 2019 dan Tahun 2020. Tahun 2019 tidak dapat di bandingkan, dikarenakan Dinas Perhubungan tidak memangku Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pontianak pada tahun tersebut. Baru di tahun 2020, Dinas Perhubungan Kota Pontianak memangku Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pontianak yaitu Meningkatnya Kualitas Transportasi dengan indikator Rata-Rata Waktu Tempuh. Tabel dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2020 dan 2021

Sasaran	Indikator	Unit	2020				2021			
			Target	Realisasi	Capaian	Ket	Target	Realisasi	Capaian	Ket
Meningkatnya Kualitas Transportasi	Rata-Rata Waktu Tempuh	Jam	0,05	0,049	102%	Sangat Berhasil	0,05	0,044	112	Sangat Berhasil
Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tingkat Kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak.	Tingkat Layanan	B	B	B	Berhasil	B	B	B	Berhasil
Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan	Tingkat Kinerja Pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	Tingkat Layanan	80%	80%	100%	Sangat Berhasil	80%	80%	100%	Sangat Berhasil

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD

Tabel berikut menunjukkan perbandingan Capaian Kinerja dan target RPJMD tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tabel
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Tahun 2021
dan Target Jangka Menengah Renstra/RPJMD

Sasaran	Indikator	Satuan	Target (%)					Realisasi (%)		Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	Capaian	
Meningkatnya Kualitas Transportasi	Rata-Rata Waktu Tempuh	jam	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,044	112	Sangat Berhasil
Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tingkat Kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak.	Tingkat Layanan	B	B	B	B	B	B	B	Berhasil
Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan	Tingkat Kinerja Pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	Tingkat Layanan	80%	80%	80%	82%	82%	80%	100%	Sangat Berhasil

Berdasarkan Tabel diatas untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota rata-rata waktu tempuh dari awal tahun periode 2021 sampai dengan akhir tahun periode 2024 dengan target 0,05 jam dan terealisasi 0,044 jam. Penargetan dari tahun ke tahun adalah sama. Capaian kinerja mencapai 112% dengan kategori sangat berhasil. Semakin tinggi kecepatan yang digunakan maka semakin sedikit waktu yang dibutuhkan.

Indikator Tingkat Kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak untuk target tahun 2021, 2022, 2023 dan 2024 dengan kategori yang sama yaitu dengan kategori B dari tahun ke tahun sedangkan capaian kinerja tahun 2021 adalah B dari target B sehingga sudah tercapai nilai capaiannya dan dikategorikan Sangat Berhasil.

Untuk Indikator Kinerja Tingkat Kinerja Pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan untuk target tahun 2021 dan tahun 2022 adalah 80%, sedangkan target tahun 2023 dan tahun 2024 adalah 82%. Tahun 2021 capaian

kinerja mencapai 80% dari target 80% dengan capaian kinerja sangat berhasil.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional

Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Pontianak dengan sasaran Meningkatnya kualitas transportasi dengan indikator rata-rata waktu tempuh tidak terdapat dalam standar nasional. Oleh karena itu analisis capaian kinerja tidak dapat di bandingkan. Begitu juga dengan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Perhubungan tidak terdapat dalam standar nasional.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja dan serta Solusi Alternatif Sasaran

Pada Tabel menyajikan Analisis Penyebab dan Solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi Penurunan Capaian ataupun mengoptimalkan Capaian.

Tabel
Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja Tahun 2021

Indikator Kinerja Utama	Keberhasilan/ Kegagalan	Penyebab	Solusi yang Dilakukan
1. Meningkatnya Kualitas Transportasi	Realisasi tingkat capaian rata-rata waktu tempuh adalah 0,044 jam dari target 0,05 jam dengan capaian kinerja 112%	<ul style="list-style-type: none"> - Berkurangnya kendaraan yang parkir menggunakan badan jalan - Kendaraan container tidak boleh beroperasi di jalan pada jam-jam tertentu sesuai dengan Perwa 48 Tahun 2016 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengaturan lalu lintas - Dilakukan penertiban parkir - Adanya razia penertiban kendaraan angkutan barang dan orang
2. Tingkat kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak	Realisasi sebesar 79,60% dari target 80% dengan capaian kinerja 99,5%	<ul style="list-style-type: none"> - Program/kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang disusun 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas perencanaan sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan
3. Tingkat kinerja pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	Realisasi sebesar 80% dari target 80% dengan capaian kinerja 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program/kegiatan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang disusun 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas perencanaan sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran

Tabel berikut menampilkan analisa efisiensi sumber daya untuk IKU Dinas Perhubungan Kota Pontianak dengan penjelasan sebagai berikut :

Tabel
Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran	Realisasi	%
Meningkatnya Kualitas Transportasi	Rata-Rata Waktu Tempuh		29.657.315.933	28.964.038.568	97,66
Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tingkat kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	28.788.579.753	28.099.612.025	97,60
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	24.970.183.044	24.613.547.216	98,57
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	1.051.096.000	1.033.589.292	98,33
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	833.312.100	620.214.002	74,43
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1.430.318.101	1.343.133.718	93,90
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	503.670.508	489.127.797	97,11
Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan	Tingkat kinerja pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	Program Pengelolaan Pelayanan	868.736.180	864.426.543	99,50
		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian	868.736.180	864.426.543	99,50
		JUMLAH	29.657.315.933	28.862.555.568	97,32

- Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota rata-rata waktu tempuh dengan anggaran Rp.29.657.315.933 dan terealisasi Rp.28.964.038.568 maka terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.693.277.365. Indikator ini merupakan akumulasi dari indikator kinerja sasaran strategis dan program pendukung capaian pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak.
- Indikator Kinerja Tingkat kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak terdapat efisiensi anggaran pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan target sebesar Rp.28.788.579.753 dan terealisasi Rp.28.099.612.025. Efisiensi anggaran sebesar Rp.688.967.728.
- Indikator Kinerja Tingkat kinerja Pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan dengan target terdapat efisiensi anggaran pada Program Pengelolaan Pelayaran sebesar Rp.868.736.180 dan terealisasi Rp.864.426.543. Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.4.309.637.

7. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pada tabel menampilkan analisa program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja. Analisa untuk masing-masing indikator sebagai berikut :

Indikator	Program/Kegiatan	2021			Ket
		Target	Realisasi	(%)	
Rata-rata waktu tempuh		0,05	0,044	112	
<i>Tingkat kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak</i>	<i>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</i>				
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	16 jenis	15 jenis	93,75	Sangat Berhasil
	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	-	-	-	-
	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang	10 unit	10 unit	100	Sangat Berhasil

	dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	300 titik	300 titik	100	Sangat Berhasil
	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	16.300 unit	11.680 unit	71,65	Berhasil
<i>Tingkat kinerja pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan</i>	<i>Program Pengelolaan Pelayaran</i>				
	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	2 kegiatan	2 kegiatan	100	Sangat Berhasil

- Indikator rata-rata waktu tempuh dengan target 0,05 jam dan realisasi 0,044 jam dan capaian 112% di dukung oleh semua program yang ada dalam DPA Dinas Perhubungan Kota Pontianak, khususnya program-program strategis/pembangunan.
- Indikator Tingkat kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak dilaksanakan dengan 1 (satu) program dan 5 (lima) kegiatan dan 11 sub kegiatan. Penjelasan untuk tiap-tiap sub kegiatan sebagai berikut:
 - Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;
 1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, indikator sub kegiatan ini yaitu jumlah penyediaan perlengkapan jalan dan pendukung lalu lintas yang tersedia adalah sebanyak 6 jenis dari target 7 jenis. Adapun pekerjaan yang terlaksana yaitu ZoSS, rambu lalu lintas, marka jalan, zebra cross, ATCS/CCTV, Penerangan Jalan Umum (PJU) dan meterisasi.
 2. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, indikator sub kegiatan ini adalah jumlah prasarana jalan yang dibangun, yaitu Pembangunan halte tidak dilaksanakan, karena anggarannya di drop.
 3. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan, sub kegiatan ini tercapai 8 jenis perlengkapan jalan yang tersedia (100%) diantaranya pemeliharaan traffic light, flashing light, rambu lalu lintas, halte,

ATCS/CCTV, pembayaran rekening listrik Kota Pontianak dan pemeliharaan PJU.

- Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan, dengan target indikator jumlah kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas yaitu 3 kegiatan dan tercapai 2 kegiatan ;
 1. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan, sub kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan anggarannya di drop dalam anggaran perubahan.
 2. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/ Kota, dengan indikator jumlah lokasi yang dilakukan pengawasan dan rekayasa lalu lintas yaitu dengan kegiatan patroli di 25 lokasi.
 3. Forum Lalu Lintas dan Angkutran Jalan Kabupaten/Kota, dengan indikator jumlah dokumen hasil koordinasi bidang LLAJ. Terealisasi 11 bahan kebijakan yang dihasilkan dari target 10 bahan kebijakan.

- Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang, dengan indikator jumlah angkutan orang yang tersedia yaitu 10 unit kendaraan;
 1. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota,
 2. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan ini terlaksana 365 hari yaitu proses pengendalian dan pengawasan angkutan umum untuk jasa angkutan orang.

- Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
 1. Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan

Kabupaten/Kota, dengan indikator jumlah lokasi penyelenggaraan dan pengawasan titik perparkiran terealisasi 300 titik perparkiran dan tercapai 100% dengan kategori sangat berhasil.

- Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
 1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dengan indikator jumlah alat pengujian yang dilakukan pemeliharaan. Terealisasi 2 paket pekerjaan yaitu pemeliharaan alat uji kendaraan dan pengecoran halaman parkir PKB.
 2. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan, dengan indikator jumlah kegiatan pengawasan pengujian kendaraan bermotor terealisasi 134 hari dari target 144 hari per tahun.
- Indikator Tingkat kinerja pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan dilaksanakan dengan 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan. Penjelasan untuk tiap-tiap kegiatan sebagai berikut :
 - Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian;
 1. Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau, sub kegiatan ini terealisasi 100% dengan kategori sangat berhasil yaitu terlaksana selama 365 hari.
 2. Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau, sub kegiatan dilakukan sebanyak 144 hari dalam setahun sesuai target yang ditetapkan. Pelaksanaan sub kegiatan ini diantaranya pengawasan sewa watas air dan pengendalian lalu lintas di sungai.

B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2021, diketahui volume anggaran pada Dinas Perhubungan Kota Pontianak adalah sebesar Rp. 42.691.172.205 (termasuk Gaji dan Tunjangan) dengan realisasi sebesar

Rp. 40.610.597.238 dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Belanja Langsung dan Tidak Langsung TA.2021

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	Tak Langsung (Gaji dan Tunjangan PNS)	10.016.008.910	9.062.633.276	90,48
2	Langsung	32.675.163.295	31.547.963.962	96,55
	Jumlah	42.691.172.205	40.610.597.238	95,13

Capaian Program dan Anggaran
Dinas Perhubungan Kota Pontianak TA. 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Meningkatnya Kualitas Transportasi	Rata-Rata Waktu Tempuh		29.657.315.933	28.964.038.568	97,66
Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tingkat kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	28.788.579.753	28.099.612.025	97,60
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	24.970.183.044	24.613.547.216	98,57
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	1.051.096.000	1.033.589.292	98,33
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	833.312.100	620.214.002	74,43
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1.430.318.101	1.343.133.718	93,90
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	503.670.508	489.127.797	97,11
Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan	Tingkat kinerja pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	Program Pengelolaan Pelayanan	868.736.180	864.426.543	99,50

		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian	868.736.180	864.426.543	99,50
		JUMLAH	29.657.315.933	28.964.038.568	97,66

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Pontianak Tahun 2021 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2021, sesuai dengan bidang tugas Dinas Perhubungan Kota Pontianak yaitu memberikan pelayanan yang maksimal di bidang perhubungan serta menata sarana dan prasarana perhubungan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis, maka secara umum Dinas Perhubungan Kota Pontianak, telah dapat merealisasi pencapaian target sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2021, sesuai tugas dan fungsinya sebagaimana yang telah diamanahkan. Adapun pencapaian secara ringkas dapat dilihat sebagaimana berikut :

1. Capaian Kinerja Sasaran Strategis *“Meningkatnya Kualitas Transportasi”* yang dicapai melalui indikator kinerja utama yaitu Rata-Rata Waktu Tempuh, dengan target 0,05 jam dan realisasi 0,044 jam dengan persentase capaian 112%, dengan kategori **Sangat Berhasil**.

2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis *“Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”* yang dicapai melalui indikator kinerja yaitu Tingkat Kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak, dengan target B dan realisasi B dengan capaian B kategori **Berhasil**.

3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis *“Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan”* yang dicapai melalui indikator kinerja yaitu Tingkat Kinerja Pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan, dengan target 80%, realisasi 80% dengan persentase capaian 100% dengan kategori **Sangat Berhasil**.

Akan tetapi, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai upaya mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, Dinas Perhubungan Kota Pontianak pada Tahun 2021 tetap dihadapkan pada beberapa hambatan atau kendala. Kendala dan permasalahan tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan bertujuan melayani masyarakat.

Demikian LAKIP ini kami sampaikan, semoga dapat dijadikan bahan masukan dan evaluasi dalam upaya peningkatan kinerja Dinas Perhubungan Kota Pontianak di masa yang akan datang.

Meningkatkan Kualitas Layanan Kepada Masyarakat	Nilai Evaluasi AKIP	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (KM) Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase tingkat Kepuasan Bidang/Bagian terhadap pelayanan Kesekretariatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi keuangan perangkat daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	10.626.010.267	12 bulan	11.860.000.000	12 bulan	11.860.000.000	12 bulan	12.091.500.000		
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ /Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	15 dokumen	17.026.208	15 dokumen	17.026.208	15 dokumen	17.026.208	15 dokumen	9.000.000			
							Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jangka waktu penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 bulan	564.780.000	12 bulan	565.000.000	12 bulan	585.000.000	12 bulan	585.000.000			
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jangka Waktu Pelayanan Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jangka waktu penyediaan surat menyurat	12 bulan	12.500.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	12.000.000
								Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jangka waktu penyediaan jasa layanan internet telepon air dan listrik	12 bulan	239.510.322	12 bulan	275.000.000	12 bulan	275.000.000	12 bulan	275.000.000	12 bulan	282.090.000
								Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jangka waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	118.500.000	12 bulan	110.000.000	12 bulan	110.000.000	12 bulan	110.000.000	12 bulan	120.000.000
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jangka waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 bulan	177.734.800	12 bulan	220.000.000	12 bulan	250.000.000	12 bulan	250.000.000	12 bulan	260.000.000
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jangka waktu penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jangka waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	17.378.633	12 bulan	15.000.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	15.000.000
								Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jangka waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	10.000.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	12.000.000	12 bulan	12.000.000	12 bulan	10.000.000
								Fasilitas Kunjungan Tamu	Jangka waktu fasilitas kunjungan tamu	12 bulan	15.900.000	12 bulan	90.000.000	12 bulan	90.000.000	12 bulan	90.000.000	12 bulan	100.000.000
								Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jangka Waktu dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 bulan	38.000.000	12 bulan	35.000.000	12 bulan	35.000.000	12 bulan	35.000.000	12 bulan	35.000.000
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jangka waktu pemenuhan/fasilitasi kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	50.953.000	12 bulan	100.000.000	12 bulan	120.000.000	12 bulan	120.000.000	12 bulan	130.000.000
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan gedung kantor	1 paket	335.163.433	1 paket	340.000.000	1 paket	340.000.000	1 paket	340.000.000	1 paket	350.000.000
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jangka waktu penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	286.171.042	12 bulan	95.760.000	12 bulan	95.760.000	12 bulan	95.760.000	12 bulan	95.760.000
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jangka waktu penyediaan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	449.931.010	12 bulan	490.000.000	12 bulan	500.000.000	12 bulan	500.000.000	12 bulan	500.000.000
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	1 unit	29.819.000		0		0		1 unit Trucklift PJU	1.571.406.000	
								Pengadaan Mebeleur	Jumlah unit mebeleur	1 paket	65.195.956	1 paket	74.460.000	1 paket	72.090.000	1 paket	75.000.000		75.000.000

			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 unit	26.499.000	1 unit	28.000.000	1 unit	28.000.000	1 unit	28.000.000
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	19 unit	568.281.916	20 unit	550.000.000	20 unit	550.000.000	20 unit	570.000.000
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	38.750.000	1 unit	50.000.000	1 unit	50.000.000	1 unit	50.000.000
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	8 jenis	133.909.400	8 jenis	145.000.000	8 jenis	147.500.000	8 jenis	157.500.000
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit rumah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat rumah Gedung Kantor	1 unit	82.938.000	1 unit	150.000.000	1 unit	157.120.000	1 unit	165.000.000
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang dikelola administrasi kepegawaiannya	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10 orang	30.000.000	10 orang	100.000.000	10 orang	120.000.000	10 orang	100.000.000
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	200 stel	168.480.000	300 stel	350.000.000	300 stel	370.000.000	300 stel	350.000.000
Nilai Evaluasi AKIP Dinas Perhubungan			Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen/laporan perencanaan penganggaran dan Evaluasi kinerja perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	9 dokumen	10.672.151	9 dokumen	10.800.000	9 dokumen	10.800.000	9 dokumen	10.800.000
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	8 dokumen	6.599.600	6 dokumen	10.000.000	6 dokumen	10.000.000	6 dokumen	8.000.000
					Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah yang Disusun	6 dokumen	7.197.329	6 dokumen	4.980.000	6 dokumen	4.980.000	6 dokumen	4.980.000

**LAMPIRAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

I n s t a n s i : Dinas Perhubungan Kota Pontianak
Tahun Anggaran : 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Outcome)	Target	Program	Kegiatan		Sub Kegiatan			
				Uraian	Indikator Kinerja (Output)	Uraian	Indikator Kinerja (Output)	Target	Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2. Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Tingkat kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak	B	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas yang disediakan dan dilakukan pemeliharaan	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan yang Dibangun	1 Paket	21.184.103.745
						Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas yang disediakan	8 Jenis	3.535.192.030
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dan Pendukung Lalu Lintas yang dilaksanakan	8 Jenis	1.830.407.270
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen hasil rekayasa lalu lintas yang dibuat	1 Dokumen	100.950.000
						Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah lokasi yang dilakukan pengawasan dan rekayasa lalu lintas	25 Lokasi	865.696.000
						Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Bidang LLAJ	10 Bahan	98.100.000
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Orang yang Tersedia	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Bus BRT Dalam Kondisi Baik.	10 Unit	1.084.750.700
						Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang	365 hari	68.960.200
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Lokasi penyelenggaraan dan pengawasan titik parkir	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemenuhan/pengelolaan operasional gedung parkir	12 bulan	1.655.839.063
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Diuji	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Alat Pengujian yang dilakukan pemeliharaan	2 paket	425.636.927
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kegiatan Pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor	144 Hari	78.033.581						
Jumlah Sasaran 2.....									30.927.669.516

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Outcome)	Target	Program	Kegiatan		Sub Kegiatan			
				Uraian	Indikator Kinerja (Output)	Uraian	Indikator Kinerja (Output)	Target	Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3. Meningkatkan Pelayanan Pelayaran Angkutan Sungai dan Penyeberangan	Tingkat kinerja pelayanan pelayaran Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	80%	Program Pengelolaan Pelayaran	Pembangunan dan Pernerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Kegiatan Pembangunan Pemeliharaan dan Pengawasan pada Pelabuhan dan Angkutan Penyeberangan	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah pengoperasian dan pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	365 hari	561.494.100
						Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah pengawasan pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	144 hari	307.242.080
Jumlah Sasaran 3.....									868.736.180



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Aliyong Nomor 7 Telepon (0561) 767136 Fax. (0561) 767136
Pontianak 78116

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dra. Hj. UTIN SRI LENA CANDRAMIDI, M.Si**

Jabatan : **Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak.**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. H. EDI RUSDI KAMTONO, MM, MT**

Jabatan : **Walikota Pontianak**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, Oktober 2021

Pihak Kedua,

WALIKOTA PONTIANAK,

Ir. H. EDI RUSDI KAMTONO, MM, MT

Pihak Pertama,

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PONTIANAK**

Dra. Hj. UTIN SRI LENA CANDRAMIDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680410 199503 2 006



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Aliyong Nomor 7 Telepon (0561) 767136 Fax. (0561) 767136
Pontianak 78116

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dra. Hj. UTIN SRI LENA CANDRAMIDI, M.Si**

Jabatan : **Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak.**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ir. H. EDI RUSDI KAMTONO, MM, MT**

Jabatan : **Walikota Pontianak**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pontianak, Oktober 2021

Pihak Kedua,

WALIKOTA PONTIANAK,

Ir. H. EDI RUSDI KAMTONO, MM, MT

Pihak Pertama,

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PONTIANAK**



Dra. Hj. UTIN SRI LENA CANDRAMIDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680410 199503 2 006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas Transportasi	1. Rata-Rata Waktu Tempuh per Kilometer	0,05 Jam
2.	Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2. Tingkat kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak	B
3.	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan	3. Tingkat kinerja pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	80%

No.	Program		Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (IK 1 dan IK 2)	Rp.	28.788.579.753,-
2.	Program Pengelolaan Pelayanan (IK 1 dan IK 3)	Rp.	868.736.180,-

Pontianak, Oktober 2021

WALIKOTA PONTIANAK, f



Ir. H. EDI RUSDI KAMTONO, MM, MT

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PONTIANAK f



Dra. Hj. UTIN SRI LENA CANDRAMIDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680410 199503 2 006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

DINAS PERHUBUNGAN KOTA PONTIANAK

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas Transportasi	1. Rata-Rata Waktu Tempuh per Kilometer	0,05 Jam
2.	Meningkatnya Kinerja Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	2. Tingkat kinerja Pelayanan Kelancaran Lalu Lintas di Kota Pontianak	B
3.	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Sungai dan Penyeberangan	3. Tingkat kinerja pelayanan Pelabuhan Sungai dan Dermaga Penyeberangan	80%

No.	Program		Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (IK 1 dan IK 2)	Rp.	28.788.579.753,-
2.	Program Pengelolaan Pelayanan (IK 1 dan IK 3)	Rp.	868.736.180,-

Pontianak, Oktober 2021

WALIKOTA PONTIANAK,

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PONTIANAK



Ir. H. EDI RUSDI KAMTONO, MM, MT



Dra. Hj. UTIN SRI LENA CANDRAMIDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680410 199503 2 006

